

ABSTRAK

Elok Fitriyana. 2026. Kewenangan Diskresi Penyidik Polri dalam Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Studi Kasus: Polres Madiun Kota). Skripsi. Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas PGRI Madiun. Pembimbing (I) Dr. Sulistya Eviningrum, S.H., M.H. (II) Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H.

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan kelompok yang memerlukan perlindungan khusus dalam sistem peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa setiap perkara pidana anak wajib diupayakan penyelesaiannya melalui diversi dengan pendekatan *restorative justice*. Dalam pelaksanaannya, penyidik memiliki kewenangan diskresi untuk menentukan langkah penyelesaian perkara dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai kewenangan diskresi penyidik dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, pelaksanaannya di Polres Madiun Kota, serta kendala dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan diskresi penyidik pada proses diversi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Madiun Kota, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; *Pertama*, Penerapan diskresi penyidik dalam diversi anak di Polres Madiun Kota memiliki legalitas kuat berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 dan UU Nomor 11 Tahun 2012 demi mewujudkan *restorative justice*. *Kedua*, Penyidik telah efektif berperan sebagai fasilitator mediasi lintas pihak guna menghindarkan anak dari dampak buruk peradilan formal. *Ketiga*, Meskipun dihadapkan pada kendala berupa penolakan korban dan stigma sosial, hambatan tersebut diatasi melalui pendekatan persuasif, edukasi manfaat diversi, serta penguatan koordinasi lintas instansi.

Kata Kunci: *Diskresi Penyidik, Diversi, Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Restorative Justice, Sistem Peradilan Pidana Anak.*

ABSTRACT

Elok Fitriyana. 2026. Discretionary Authority Of Indonesian National Police Investigators In The Implementation Of Diversion For Children In Conflict With The Law Based On Law Number 11 Of 2012. Undergraduate Thesis. Law Study Program, Faculty of Law, Universitas PGRI Madiun. Supervisor (I) Dr. Sulistya Eviningrum, S.H., M.H. Supervisor (II) Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H.

Children in conflict with the law constitute a group requiring special protection within the criminal justice system. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System stipulates that every criminal case involving a child must be resolved through diversion based on a restorative justice approach. In its implementation, investigators possess discretionary authority to determine appropriate measures for case resolution while prioritizing the best interests of the child. This study aims to analyze the legal framework governing investigators' discretionary authority in the implementation of diversion for children in conflict with the law, its implementation at the Madiun City Resort Police, as well as the obstacles encountered and efforts undertaken in exercising such discretion during the diversion process.

This research employs a normative-empirical legal research method using statutory, conceptual, and sociological approaches. Primary data were obtained through interviews with investigators of the Women and Children Protection Unit (PPA Unit) of the Madiun City Resort Police, while secondary data were collected through a literature review of legislation, books, scholarly journals, and other supporting documents. The data were analyzed using a descriptive qualitative method.

The results of the study indicate that: first, the application of investigators' discretion in juvenile diversion at the Madiun City Resort Police has a strong legal basis under Law Number 2 of 2002 and Law Number 11 of 2012 in order to realize restorative justice. Second, investigators have effectively acted as facilitators in mediation involving various parties to prevent children from experiencing the adverse effects of formal criminal proceedings. Third, although the implementation process faces obstacles, including victims' refusal to participate and prevailing social stigma, these challenges are addressed through persuasive approaches, education regarding the benefits of diversion, and strengthened inter-agency coordination.

Keywords: *Investigators' Discretion, Diversion, Children in Conflict with the Law, Restorative Justice, Juvenile Criminal Justice System.*